KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : proyek parlemen modern bermula dari gagasan besar soekarno
Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2015
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Proyek Parlemen Modern Bermula dari Gagasan Besar Soekarno

Konsep kawasan gedung parlemen yang ada sekarang sebetulnya berawal dari gagasan besar Presiden RI pertama Soekarno, tahun 1965. Ketika itu, Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan PBB, karena Malaysia yang sedang berseteru dengan Indonesia diangkat sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Bung Karno pun memutuskan membuat organisasi PBB tandingan bernama *Conference of New Emerging Forces* (CONEFO).

Konferensi kekuatan negara-negara baru (CONEFO) yang digagas Soekarno itu, mendapat dukungan dari negara-negara non blok yang baru merdeka di Asia, Afrika, Amerika latin, dan beberapa negara Eropa. Markas besar CONEFO itu dibangun di Senayan, berupa gedung Nusantara, tempat MPR, DPR, dan DPD RI sekarang bersidang tiap tahun. Gedung ini akrab pula disebut sebagai gedung kura-kura.

Dengan gedung itu, kian mempertegas keinginan Soekarno untuk menyatukan negara-negara yang baru merdeka sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Kekuatan yang tidak menghamba ke barat, tidak juga menyembah ke timur. Soekarno pun ingin membangun gedung-CONEFO jauh lebih mewah daripada gedung PBB di New York. Bahkan konsep bangunannya harus berbeda dengan *Capitol Hills* di Washington.

Adalah Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang banyak memberi penjelasan atas riwayat gedung bersejarah itu. Ditemui di ruang kerjanya Rabu (18/8) lalu, ia kembali menyegarkan ingatan kolektif bangsa atas sejarah dan konsep kawasan komplek parlemen yang ada sekarang. Menurut Fahri, gedung hijau kura-kura itu, sudah saatnya dijadikan cagar budaya dan tidak lagi digunakan untuk perhelatan politik-ketatanegaraan.

DOK. DPR



WAKIL KETUA DPR RI FAHRI HAMZAH

Selain kapasitasnya yang sempit tak mampu lagi menampung tamu undangan yang kian banyak, gedung itu juga sudah tua di atas 50 tahun. Jadi sebaiknya dijadikan museum parlemen. "Berdasarkan UU, gedung ini sudah menjadi cagar budaya. Karena sudah jadi gedung cagar budaya, tentu tidak layak jika diperlakukan dengan cara lama, yaitu dibebankan sebagai tempat rapat-rapat politik anggota dewan. Kami ingin agar gedung tua ini dijadikan museum," ungkap Fahri.

Fahri ingin mendudukkan persepsi publik pada tempatnya bahwa gedung ini peruntukkan dasarnya bukan gedung parlemen. Untuk itu, DPR ingin membangun konsep parlemen modern dengan membangun gedung parlemen yang lebih layak dan terpadu. Saatnya nanti, kata Fahri, Presiden terpilih dilantik di muka gedung kura-kura, tepat di atas tangga, tidak di dalam gedung yang sempit lagi.

"Kami sedang mengusulkan dengan pihak istana, agar Presiden pidato di halaman DPR, di atas tangga gedung. Dan rakyat juga bisa melihat langsung penampilan presidennya yang gagah saat berpidato."

Tujuh tahap

Dijelaskan Fahri, ada tujuh tahap proyek pembangunan komplek parlemen. Tahap pertama, membangun alun-alun demokrasi. Filosofisnya, DPR adalah pusat aspirasi publik. Di alun-alun itulah nantinya masyarakat bisa menyuarakan langsung aspirasinya. DPR memfasilitasi aksi demonstrasi di tempat yang layak dan tidak menganggu kepentingan publik. Lokasinya berada di sisi kanan gedung yang kini menjadi tempat olahraga (jantung sehat).

Tahap kedua, membangun museum. Gedung CONEFO atau kura-kura dijadikan pusat museum parlemen. Di dalamnya ada perjalanan sejarah parlemen Indonesia sejak kali pertama berdiri di era kolonial dengan nama Volksraad (Dewan Rakyat). Lalu ada parlemen di era awal kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Orde Reformasi. Bahkan, lengkap dengan perjalanan sejarah DPRD dan DPD RI.

Tahap ketiga, membangun perpustakaan yang konprehensif. Di dalamnya ada literatur berupa buku-buku, media massa, dan lain-lain yang terkoleksi dengan baik sebagai bahan referensi kajian dan data. Tahap keempat, membangun sistem akses. Jalan masuk ke kawasan komplek parlemen akan dibenahi, termasuk pusat layanan pengunjung. Ini untuk memudahkan para tamu dan pengunjung yang ingin ke parlemen.

Tahap kelima, membangun pusat kajian. Kelak, parlemen modern yang sedang dibangun ini, akan memiliki pusat kajian anggaran, pusat kajian legislasi, dan pusat kajian akuntabilitas keuangan negara. Ini penting bagi DPR sebagai dapur legislasi dan anggaran. Sudah ada Keppres yang mengatur hal ini.

Tahap keenam, membangun ruang kerja anggota dan tenaga ahli. Selama ini, ruang kerja anggota dan tenaga ahli di gedung Nusantara I sudah tak memadai lagi. Tahap ketujuh, mengintegrasikan kawasan secara utuh. Menurut Fahri, dalam konsep ini ada dua hal utama yang diintegrasikan, yaitu *collective mind* dan *collective memory*.

Semua anak bangsa harus menyadarai bahwa parlemen merupakan pusat pengambilan keputusan sekaligus pusat pengetahuan. Para pendiri Republik ini sudah sejak lama menyadari pentingnya hal tersebut.

"Inilah tujuh hal yang akan kita kerjakan setahap demi setahap. Selesainya kapan, kita tidak tahu. Saat ini, semuanya masih dalam tahap perencanaan, karena harus melalui sistem penganggaran dari APBN kita. Tidak bisa kita mengambil dana di luar APBN," papar Fahri.

Semua anggota DPR sudah setuju atas rencana proyek pembangun ini. Proses selanjutnya, sambung Fahri, jatuh kepada kuasa pengguna anggaran, yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI. ● ril